

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FAKULTAS TENTANG PENGGUNAAN SERAGAM DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KARAKTER CALON GURU DI FKIP UNS

Anisse Alami

Progam Studi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga
Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Sebelas Maret
FKIP Ekonomi Pendidikan Tata Niaga UNS
Email: anissealami@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas implementasi kebijakan fakultas tentang penggunaan seragam ditinjau dari segi *context*, *input*, *process*, dan *product*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengevaluasi sebuah kebijakan dalam bidang pendidikan dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa: dilihat dari segi *context*, latar belakang pembuatan kebijakan adalah kondisi cara berpakaian calon guru di FKIP UNS yang tidak mencerminkan karakter calon pendidik. Tujuan penggunaan seragam adalah untuk membentuk karakter sebagai seorang calon guru yang disiplin, taat dan tertib pada aturan, membentuk kewibawaan melalui pembiasaan, mengurangi kesenjangan ekonomi, membentuk *sense of belonging* terhadap FKIP, membentuk *sense of unity*, sebagai pembeda dengan mahasiswa fakultas lain (identitas), agar mahasiswa calon guru terlihat rapih, dan filter atas perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan seorang calon guru. Dilihat dari segi *input*, keterlibatan para pelaksana kebijakan dalam pembuatan kebijakan sampai pada tahap penyampaian kondisi cara berpakaian mahasiswa FKIP yang disampaikan dalam MKPF hingga rapat senat. Reaksi atas kemunculan SE tersebut antara lain senang, senang namun kurang puas karena landasan hukum yang masih berupa SE, terkejut, dan biasa. Tidak ada penolakan secara langsung pada kebijakan tersebut. Dilihat dari segi *process*, Sarana yang digunakan adalah peringatan yang ditempel di Gedung F, penempelan SE di mading jurusan, prodi, BKK, tulisan di buku pedoman, membagikan SE pada saat Osmaru, penempelan banner di Gedung D dan SMS *Gateway*. Hambatan yang terjadi selama proses implementasi adalah masih belum kuatnya dasar hukum kebijakan, kurangnya kepedulian dosen dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menyosialisasikan kebijakan. Dilihat dari segi *product*, perubahan yang terjadi setelah mahasiswa menggunakan seragam adalah mahasiswa menjadi lebih tertib, disiplin, bangga terhadap FKIP (*sense of belonging*), lebih terkontrol dalam bertindak, merasa lebih berwibawa dan dapat ditauladani.

Kata kunci: seragam, calon guru, pendidikan karakter, CIPP

Abstract: The purpose of this research is to describe the effectiveness of the implementation of faculty policy about wearing uniform for prospective teachers in FKIP UNS in terms of context, input, process, and product. This research is a qualitative descriptive study which evaluates a policy in the field of education by using the evaluation model CIPP (Context, Input, Process, and Product). Based of the research, it can be concluded: seen from the context side, the background wearing uniform policy is a condition of prospective teachers in FKIP UNS appearance which do not reflect the character of prospective educators. The purpose of wearing uniform policy is to build the students' character as aspiring teachers who are discipline, obedient, and compliant to the rules, and authority, reduce economic inequality, form sense of belonging of FKIP, establish sense of unity, and differentiate with other faculties' students (identity), so that prospective teachers in FKIP UNS look neat, and avoid behaviors that do not

reflect prospective teachers. Seen from the input side, involvement of the stake holders of the policy making to the report submission of the condition the students' way in dressing in MKPF presented to the senate meeting. There are various reactions to the emergence of SE such as happy, happy but still feel less satisfied because the legal basis is only SE, shocked, and neutral. There is no refusal reaction to the policy. Seen from the process side, so far, means used each year are warnings posted in Building F, attachment of SE in each majors' announcement board, manual which is distributed to new students during orientation, sticking banners in Building D and SMS Gateway. Obstacles that occur during the implementation process is still not strong legal basis of policy, lack of lectures' caring and utilization of facilities and infrastructure to disseminate policy. Seen from the product side, the purpose of the policy has been achieved quite effectively such as the students become more orderly, discipline, proud of being prospective teachers in FKIP UNS (sense of belonging), better controlled behavior, feeling credible and being good model.

Keywords: uniform, prospective teachers, character education, CIPP

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis multidimensional yang semakin lama semakin luas dan tampak. Peradaban bangsa yang luhur telah hilang. Bangsa yang dulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi, saat ini tergantikan dengan sebutan bangsa korup, tidak bermoral, tidak berkarakter, negeri yang hampir bangkrut, dan sebutan buruk lainnya.

Berita di berbagai media masa semakin sering memberitakan tindakan-tindakan tidak bermoral masyarakat Indonesia. Banyak pemimpin yang melakukan korupsi dan suap sehingga merugikan negara dengan angka mencapai trilyunan rupiah di saat keterpurukan sedang dirasakan oleh banyak rakyat Indonesia. Keterpurukan tersebut diantaranya, 11 % dari 900 ribu yaitu sekitar 100 ribu gedung sekolah di Indonesia mengalami kerusakan ringan hingga berat (data Kemendiknas tahun 2011 dalam Hidayat, 2012) yang mengancam kelanjutan sekolah jutaan siswa di Indonesia, dan sekitar 2,7 juta siswa setingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP terancam putus sekolah karena kemiskinan (data Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dalam Hidayat, 2012).

Tahun 2012, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia adalah 32 (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih) dan di peringkat 118 dari 176 negara. Saat ini,

Indonesia masih berada satu kelompok dengan negara-negara yang digolongkan korup seperti Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Sementara, untuk kawasan Asia Tenggara Indonesia menempati peringkat 6 di bawah Singapura dengan skor IPK 87, Brunei Darussalam (55), Malaysia (49), Thailand (37), Filipina (34), dan Timor Leste (33) ("Rilis Indeks", 2012)

Kemerosotan moral tidak hanya terjadi di tataran pemimpin saja, tetapi juga di tataran masyarakat. Kemerosotan moral tersebut diantaranya adalah tawuran antarsiswa dan mahasiswa, merebaknya video porno, meluasnya penyebaran narkoba, hingga perilaku sex bebas yang seolah-olah menjadi hal yang semakin biasa di kalangan pemuda. Hal ini sesuai dengan *Sexual Behavior Survey 2011* yang dilakukan oleh DKT Indonesia pada Mei 2011 dengan mengungkapkan 39% responden usia 15-19 tahun sudah pernah melakukan sex bebas dan 61% sisanya adalah pemuda usia 20-25 (*Duh Sex*, 2012).

Banyak masyarakat yang bertanya di mana letak kesalahan bangsa ini, sumber masalah dan penyebab semua kekacauan ini. Sorotan terbesar tertuju pada sistem pendidikan nasional. Berbagai pendapat dan kritik mulai terlontar. Sistem pendidikan dengan guru sebagai ujung tombaknya ini dianggap yang paling bertanggung jawab pada semua kekacauan ini.

UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal tersebut secara langsung memberi gambaran bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan saja tetapi juga mengembangkan watak atau karakter bangsa. Jelaslah bahwa arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional sangat luhur dalam keinginannya mewujudkan manusia yang berkarakter mulia.

Arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut sayangnya belum tercapai dengan baik. Realita kondisi masyarakat yang digambarkan melalui fenomena-fenomena sosial yang mengkhawatirkan seperti di atas merupakan bukti dari hal ini. Para praktisi pendidikan seringkali mengukur kesuksesan pendidikan bukan dari iman, takwa, akhlak, kreatif, atau mandiri siswanya, tetapi hanya fokus dari segi dari ilmu. Pendidikan lebih mengunggulkan otak daripada watak, lebih mementingkan hasil daripada proses, dan pendidikan lebih meng-hargai kepentingan individu daripada kepentingan bersama, hanya mengutamakan kompetitif daripada kooperatif. Sayangnya ketimpangan terse-but telah menjadi kenyataan, sehingga lahirnya masyarakat yang cenderung individualistis, materialistis, dan mengedepankan rasio atau otak saja. (Rachman, 2011).

“Berbicara tentang pendidikan nasional sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang dapat terjadi di tangan guru. Kualitas pendidikan sebenarnya berada di tangan guru” (Surachmad, 2009: 260). Guru merupakan praktisi pendidikan yang langsung bersentuhan dengan siswa. Segala bentuk peraturan yang dibuat oleh birokrat gurulah yang bertanggung jawab dalam

pelaksanaannya. Sehingga, seorang guru hendaknya tidak hanya memiliki kemampuan pengelolaan pembelajaran (kompetensi pedagogik), kemampuan bersosialisasi (kompetensi sosial), dan kemampuan penguasaan materi pembelajaran (kompetensi profesional) saja, tetapi guru hendaknya juga memiliki kemampuan kepribadian mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa agar bisa menjadi tauladan bagi siswa-siswanya.

Salah satu upaya signifikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional adalah melalui peningkatan kompetensi guru. “Guru sudah selayaknya memiliki tiga kompetensi dasar, yaitu dalam akademis, metodologis dan psikologis. Tidak lagi cukup membekali guru hanya dengan kemampuan mengajar. Guru juga wajib dibekali pengetahuan tentang kepribadian sehingga menjadi pribadi yang matang” (Rachman, 2011: 31). “Ketauladanan seorang guru dapat dibiasakan dan dilakukan sejak awal, bahkan sejak mereka belajar menjadi guru saat di kampus. Dalam hal ini, LPTK lah yang mempunyai andil besar untuk membentuk karakter guru sebagai pendidik” (Suharno, 2010: 199).

Andil besar ini dimulai FKIP UNS dengan membuat visi yang berlandaskan nilai karakter. FKIP UNS memiliki visi menjadi LPTK penghasil dan pengembang tenaga kerja kependidikan yang berkarakter kuat dan cerdas berko-mitmen melahirkan tenaga kependidikan yang handal atau memiliki seperangkat kompetensi. Kompetensi utama yang harus melekat pada tenaga kependidikan adalah nilai-nilai kejujuran, keamanan, keteladanan dan mampu melakukan pendekatan yang pedagogis serta mampu berfikir dan bertindak cerdas.

Salah satu upaya yang dilakukan FKIP UNS untuk mewujudkan visi tersebut adalah keluarnya kebijakan dekan tentang penggunaan seragam atasan berwarna putih dan bawah berwarna gelap yang tertuang dalam Surat Edaran No: 585/H27.1.2/KM/2008. Surat Edaran ini berlaku mulai perkuliahan semester gasal 2008/2009. Selama empat tahun sejak pelaksanaannya, setiap Senin dan Selasa di lingkungan FKIP UNS akan terlihat

pemandangan seluruh mahasiswa yang menggunakan seragam putih hitam.

Evaluasi program kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan yang sudah tercapai, dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya. Arikunto & Jabar (2004) mengatakan, "Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya" (hlm. 7).

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimanakah efektivitas implementasi kebijakan FKIP UNS tentang penggunaan seragam ditinjau dari segi *context*, *input*, *process*, dan *product*.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Mengenai Pendidikan Karakter

Menurut Tim Kemendiknas ada dua pengertian tentang karakter. Pertama ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan 'personality'. Seseorang baru bisa disebut 'orang yang berkarakter' (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral (Direktorat Ketenagaan & Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2010).

Sementara itu, Indonesia Heritage Foundation dalam Hasanah (2009) merumuskan beberapa bentuk karakter yang harus ada dalam setiap individu bangsa Indonesia, diantaranya; cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, jujur, hormat, dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, dan toleransi, cinta damai dan persatuan.

Selanjutnya menurut Rachman (2011) setidaknya terdapat 13 watak yang perlu dikembangkan di Indonesia, yaitu bertaqwa,

fleksibel (*flexible*), keterbukaan (*open*), ketegasan (*decisive*), berencana (*organize*), mandiri (*independence*), toleransi (*tolerate*), disiplin (*discipline*), berani ambil resiko (*risk taker*), sportif (*sportive*), setia kawan (*loyalty*), integritas (*integrity*), orientasi masa depan-penyelesaian tugas (*future oriented*). Sayangnya, menurut Cross Cultural Understanding, masyarakat Indonesia ternyata memiliki nilai terendah untuk poin 2 sampai 13.

Pendidikan telah menjadi bahan pembicaraan sejak jaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemikiran mengenai pendidikan dan tujuan pendidikan oleh para ahli filsafat kuno. Socrates yang dikutip oleh Grube (1980) berpendapat bahwa, "Tujuan pendidikan yang paling mendasar adalah membentuk individu menjadi baik dan cerdas (*good and smart*)" (Padmono, 2011:10). Plato berpendapat, "Agar anak dapat meraih kebenaran dan kebajikan diperlukan pedoman moral yang jelas agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan" (Padmono, 2011: 11). Aristoteles mengarahkan pendidikan kepada kebajikan atau nilai (*virtue*) individu. Kebajikan atau nilai (*virtue*) itu mengandung dua aspek yaitu intelektual dan moral (Padmono, 2011: 12).

Dewantoro berpendapat, "... pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita..." (Satriawan, 2012:1).

Teori-teori tentang pendidikan di atas memberikan pengertian bahwa pendidikan tidak semata-mata mengajarkan ilmu-ilmu akademik saja namun juga memproses peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Menurut UU No 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pasal ini menjelaskan bahwa pendidikan berfungsi tidak hanya membentuk kematangan seseorang dari segi keilmuan saja, tetapi juga membentuk watak seseorang. Oleh karena itu proses pendidikan yang dilakukan harus dapat mewujudkan karakter peserta didik yang lebih baik dan bermartabat.

Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas (2010) berpendapat, pendidikan karakter mempunyai makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habitation*). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik, harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik” (*moral knowing*), tetapi juga “merasakan dengan baik” atau “*loving the good*” (*moral feeling*), dan “perilaku yang baik” (*moral action*). Jadi pendidikan karakter erat kaitannya dengan “*habit*” atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan dan dilakukan. Jadi pendidikan karakter terkait erat dengan “*habit*” atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan atau dilakukan (Direktorat Ketenagaan & Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi).

Strategi Membentuk Karakter

Pengembangan pendidikan karakter telah menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan Kemendiknas melalui Direktorat Ketenagaan & Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi telah membuat rancangan pembangunan karakter bangsa melalui bidang pendidikan untuk mewujudkan perilaku berkarakter yang dijabarkan melalui gambar 1



Gambar 1 Konteks Makro Pendidikan Karakter

(Sumber: Direktorat Ketenagaan & Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2010: 26)

Gambar 1 menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang dirancang secara makro melibatkan berbagai sektor kehidupan, tidak hanya sektor pendidikan. Nilai-nilai luhur yang dapat dikembangkan pada proses pendidikan karakter bisa didapat dari berbagai macam sumber. Pertama dari sumber hukum yang berupa agama, Pancasila, dan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Kedua dari berbagai macam teori pendidikan, nilai, psikologi, sosial, dan budaya. Ketiga pengalaman terbaik (*best practices*) dan praktik nyata yang terdapat pada masyarakat.

Melalui intervensi tri pusat pendidikan seperti satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, yang didukung dengan kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana dan prasarana, kebersamaan, dan komitmen pemangku kepentingan, nilai-nilai luhur ini dikembangkan melalui *habitation*. Apabila ini terlaksana secara optimal, maka akan terbentuk perilaku berkarakter

Hasil Studi dari Berkowitz & Bier (2003) menunjukkan bahwa, “*Character education can improve academic achievement, behavior, and attitudes*” (Bower, 2003: 64). Menurut mereka pendidikan karakter dapat meningkatkan prestasi akademik, tingkah laku, dan sikap.

Rachman (2011) berpendapat bahwa, pendidikan karakter di sekolah dapat dikembangkan dengan mengajarkan keteraturan melalui peraturan sekolah yang mendorong terjadinya masyarakat sekolah

yang terpelajar, yang mendorong masyarakat sekolah sadar menjaga nama baik sekolah, masyarakat sekolah yang ramah satu sama lain (hlm. 32).

Hidayatullah (2010) membagi strategi pendidikan karakter melalui sikap-sikap keteladanan guru, penanaman atau penegakan kedisiplinan melalui peraturan di sekolah, pembiasaan, menciptakan suasana yang kondusif, integrasi dan internalisasi nilai-nilai karakter.

Nilai-nilai Utama Karakter Guru

Guru berkarakter diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memungkinkan menanamkan karakter pada peserta didik. Seorang guru baru bisa dikatakan sebagai guru yang berkarakter apabila tidak hanya mampu mentransfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai kehidupan yang diperlukan peserta didik. Ia tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual sehingga ia mampu membuka hati peserta didiknya untuk belajar menjadi manusia seutuhnya.

Hidayatullah (2010) menyatakan bahwa seorang guru hendaknya mampu menjaga amanah sebagai pendidik dengan memiliki tekad yang kuat untuk meningkatkan kompetensinya, selalu bekerja keras hingga tujuan tercapai, dan memiliki konsistensi atas apa yang dilakukannya. Seorang guru harus hidup bersahaja dan sederhana/tidak bermewah-mewahan, memiliki kemampuan berinteraksi secara dinamis kepada seluruh peserta didik dengan baik, dan memberikan pelayanan maksimal untuk memenuhi kebutuhan peserta didik agar potensinya dapat diberdayakan secara optimal. Seorang guru hendaknya tidak hanya memiliki kemampuan cepat mengerti, memahami, tanggap, tajam dalam menganalisis, mampu memecahkan masalah, dan berikan solusi (cerdas intelektual), tetapi juga mampu memberikan makna/nilai terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan hingga hasilnya optimal (cerdas emosi dan spiritual).

Pakaian dan Seragam

Pakaian menurut Laurie (1992) adalah, "Ekspresi dan identitas seseorang karena ketika memilih pakaian di toko maupun di rumah berarti mendefinisikan dan mendeskripsikan diri sendiri" (Nordhlot, 2005: 1). Nordhlot menjelaskan bahwa pengertian ini tidak berlaku bagi seragam yang dimaksudkan untuk mengurangi individualitas sebanyak mungkin guna mencapai identitas kolektif. "Pakaian telah dikaitkan secara erat dengan jati diri (identitas, kepribadian) nasional dengan struktur kelas, dengan kualifikasi profesional, konvensi masa tertentu, dengan tahap-tahap pertumbuhan dan penuaan, dengan pertunjukkan dan perayaan kesenian" (Dillisone, 2002: 55).

Brusna & Rockquemore (1998) mengatakan:

Advocates believes that uniform increase student learning by increasing positive attitudes towards school and enhancing the learning environment by reducing distractions related to clothing or dress, and by developing a sense of belonging, cohesion, camaraderie among students for their school. For similiar reason, advocates also believes that wearing uniforms leads to decreased competition among students regarding clothes resulting in fewer behavior problems, increased attendane rates, and lowered rates of suspension and substance use among students. Finally, advocates believes that dimished competition and conflict related to dress may lead to increase self-esteem and increase school spirit (Strom, Peterson, & Miller, 2003: 4).

Sukastomo (2004) berpendapat bahwa seragam memiliki banyak fungsi diantaranya adalah, menciptakan kedisiplinan. Pemakaian seragam yang ditentukan harinya, dapat menciptakan perasaan dan semangat disiplin. Membentuk kerapian, menampakkan keindahan. Kerapian akan memunculkan keindahan yang enak dipandang. Tercipta rasa persatuan dan kesatuan di antara anggotanya dan sebagai kendali. Orang yang memakai seragam secara otomatis dirinya

akan terkendali karena mencerminkan sebuah institusi dari seragam tersebut (Budyati, 2010). Secara sederhana seragam sekolah memiliki fungsi yaitu menyatukan keberagaman pelajar dan sebagai bentuk kedisiplinan pelajar (Budyanti, 2010).

Evaluasi Program

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pengambil keputusan belum tentu dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan jiwa kebijakan. Perlu adanya evaluasi program untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan yang sudah tercapai, dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya. Evaluasi program dengan baik dikemukakan oleh Arikunto & Jabar (2004) dalam sebuah definisi, "Evaluasi program adalah upaya untuk tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya" (hlm. 7).

Menurut Arikunto & Safruddin (2008) ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, yaitu, menghentikan program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarkan program (melaksanakan program di tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu) (Widoyoko, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Dekan FKIP UNS selaku pembuat kebijakan penggunaan seragam, ketua jurusan, dosen, dan mahasiswa. Data yang didapat kemudian diuji kevalidannya dengan triangulasi sumber dan metode. Proses pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data, dan verifikasi data/penarikan kesimpulan dilakukan secara interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas implementasi kebijakan dekan tentang penggunaan seragam ditinjau dari segi context

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi cara berpakaian calon guru di FKIP UNS yang tidak mencerminkan calon pendidik seperti memakai baju ketat dan terlalu pendek, memakai celana jeans pensil, berkaos, bahkan rambut diwarnai dengan warna yang tidak wajar menjadi latar belakang dibuatnya kebijakan fakultas tentang penggunaan seragam bagi calon guru di FKIP UNS.

Seragam diharapkan dapat membentuk karakter sebagai seorang calon guru yang disiplin, taat dan tertib pada aturan, dan membentuk kewibawaan melalui pembiasaan saat masih menjadi calon guru (mahasiswa). Selebihnya terdapat tujuan yang dapat langsung berdampak pada saat mahasiswa masih duduk di bangku kuliah yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi, membentuk *sense of belonging* terhadap FKIP UNS, membentuk *sense of unity*, sebagai pembeda dengan mahasiswa fakultas lain (identitas), agar terlihat rapih, dan filter atas perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan seorang calon guru.

Tujuan-tujuan itu dapat dilihat dari fungsi seragam. Sukastomo (2004) berpendapat bahwa seragam memiliki banyak fungsi diantaranya adalah, menciptakan kedisiplinan. Pemakaian seragam yang ditentukan harinya, dapat menciptakan perasaan dan semangat disiplin. Membentuk kerapian, menampakkan keindahan. Kerapian akan memunculkan keindahan yang enak dipandang. Tercipta rasa persatuan dan kesatuan di antara anggotanya dan sebagai kendali. Orang yang memakai seragam secara otomatis dirinya akan terkendali karena mencerminkan sebuah institusi dari seragam tersebut (Budyati, 2010).

Disiplin merupakan salah satu karakter yang harus ada dalam diri masyarakat Indonesia. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Rachman (2011) setidaknya terdapat 13 watak yang perlu dikembangkan di Indonesia, salah satu diantaranya adalah disiplin. Sayangnya, menurut Cross Cultural Understanding, masyarakat Indonesia ternyata memiliki nilai rendah untuk disiplin (hlm.32).

Hilangnya kedisiplinan pada diri masyarakat Indonesia apalagi calon guru merupakan suatu hal yang harus dicari solusi dan salah satu solusi yang dibuat FKIP UNS adalah mengharuskan mahasiswanya menggunakan seragam. Hal ini sesuai dengan teori Hidayatullah (2010) tentang strategi pendidikan karakter yang menyatakan bahwa salah satu cara pembentukan karakter yaitu melalui penegakan kedisiplinan melalui pembuatan aturan.

Fungsi seragam selanjutnya adalah membentuk sikap tertib dan patuh pada peraturan. Teori Hidayatullah (2007) mengungkapkan bahwa kepribadian yang harus ada dalam diri guru salah satu indikatornya adalah memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma dengan cara menaati tata tertib secara konsisten. Kebijakan penggunaan seragam mengarahkan mahasiswa untuk memiliki kepribadian yang taat pada peraturan.

Salah satu sub kompetensi dari kompetensi kepribadian yang harus ada pada seorang guru adalah memiliki kepribadian yang berwibawa dengan menunjukkan perilaku terpuji sehingga dapat dicontoh oleh muridnya (Hidayatullah, 2007). Kepribadian yang berwibawa ini dapat dibentuk melalui penggunaan seragam karena dengan menggunakan seragam, seorang guru dapat menunjukkan perilaku positifnya seperti disiplin dan tertib pada peraturan.

Terdapat 4 informan yang mengatakan bahwa seragam dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Budiyan (2010), bahwa seragam sekolah dapat menyatukan keberagaman pelajar sehingga mengurangi gap antara yang kaya dan yang miskin.

Mahasiswa akan merasa bangga dan memiliki rasa kepemilikan terhadap FKIP

UNS. Salah satu tujuan dari penggunaan seragam adalah agar mahasiswa memiliki *sense of belonging* terhadap FKIP UNS. Ketika semua mahasiswa FKIP UNS bersama-sama menggunakan warna putih gelap hari Senin dan Selasa maka akan menimbulkan rasa kepemilikan dan bangga terhadap fakultasnya karena mahasiswa tersebut menjadi bagian di dalamnya. Teori mengenai ini dikemukakan oleh Brusna & Rockquemore (1998) yang mengatakan, "*Advocates believes that uniform increase student learning by increasing positive attitudes towards school and enhancing the learning environment by reducing distractions related to clothing or dress, and by developing a sense of belonging....*" (Strom, Peterson, & Miler, 2003: 4)

Seragam dapat menunjukkan ciri khas atau identitas suatu kelompok yang membedakan dengan kelompok lain. Pendapat ini dikemukakan oleh 5 informan. Menurut mereka seragam yang dikenakan mahasiswa FKIP UNS adalah pembeda antara mahasiswa FKIP dengan mahasiswa fakultas lain. Ini akan sangat terlihat jelas pada hari Senin dan Selasa di mana hanya ada satu fakultas yang mahasiswanya menggunakan seragam, yaitu FKIP. Teori mengenai seragam sebagai penunjuk identitas diungkapkan oleh Nordlot yang menjelaskan bahwa fungsi pakaian yang dapat digunakan sebagai media ekspresi dan identitas individu tidak terlalu bagi seragam yang dimaksudkan untuk mengurangi individualitas sebanyak mungkin guna mencapai identitas kolektif (2005).

Identitas berupa seragam yang hanya dikenakan oleh mahasiswa FKIP secara tidak langsung akan menjadi kendali atau filter mahasiswa calon guru atas perilaku buruk. Hal ini dapat dipahami bahwa seragam ini menyiratkan pesan bahwa mereka adalah calon guru yang harus menjaga perilakunya. Sehingga minimal ketika bertemu dengan mahasiswa fakultas lain mereka akan merasa malu apabila berperilaku buruk karena mengenakan identitas calon guru.

Berbagai macam tujuan diimplementasikannya seragam bagi mahasiswa

apabila dapat tercapai semua, maka sedikit demi sedikit akan terbentuk karakter yang dapat ditauladani bagi murid-murid mahasiswa calon guru kelak. Seluruh karakter tersebut tidak dapat terbentuk secara tiba-tiba saat mereka telah menjadi guru, namun dilakukan dengan cara pembiasaan saat mereka menjadi calon guru.

Teori mengenai pembiasaan sikap-sikap berkarakter ini telah dirumuskan oleh Kemendiknas melalui Direktorat Ketenagaan & Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang dijabarkan melalui konsep makro pendidikan karakter. Penggunaan seragam merupakan nilai-nilai luhur yang didapat dari teori pendidikan yang didukung dengan adanya kebijakan berupa SE Dekan. Kebijakan yang dibuat ini sekaligus menggambarkan bahwa terdapat intervensi atau campur tangan dari FKIP untuk membentuk perilaku berkarakter. Penggunaannya pada hari Senin dan Selasa merupakan dan pembiasaan terhadap tujuan-tujuan di balik penggunaannya. Apabila selama prosesnya berjalan dengan maksimal, maka terbentuklah perilaku mahasiswa FKIP yang berkarakter sesuai dengan visi FKIP UNS.

Efektivitas implementasi kebijakan dekan tentang penggunaan seragam ditinjau dari segi input

Keterlibatan para pelaksana kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan saat itu sampai pada tahap penyampaian kondisi cara berpakaian calon guru di FKIP UNS yang disampaikan dalam MKPF hingga rapat senat. Kemudian berkembang pada usulan dibuatnya sebuah regulasi yang mengatur cara berpakaian mahasiswa FKIP. SE tersebut keluar sebagai bagian dari usulan-usulan yang berkembang, namun secara redaksional telah ditentukan oleh dekan. Jenjang organisasi di bawah fakultas diberi kebebasan dalam menentukan strategi untuk menyelesaikan kebijakan.

Keterlibatan para pelaksana dalam merumuskan strategi implementasi merupakan salah satu kunci kesuksesan pencapaian suatu program. Gross, Giacuinta, dan Berstein (1971)

mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi konflik tujuan implementasi kebijakan. Salah satu dari faktor-faktor ini adalah sejauh mana para pejabat bawahan (*implementataors*) berperan serta dalam pembuatan keputusan kebijakan. Hal itu dikarenakan peran serta menimbulkan semangat staf yang tinggi dan semangat staf yang tinggi diperlukan untuk keberhasilan implementasi, menimbulkan komitmen yang besar dan komitmen yang besar memengaruhi perubahan, menimbulkan kejelasan, mengurangi resistensi awal, dan para pejabat bawahan cenderung menentang suatu pembaharuan, jika prakarsa semata-mata berasal dari pejabat atasan mereka (Winarno, 2008).

Keterlibatan para pelaksana dalam membahas masalah yang berkembang di FKIP pada saat itu sampai pada tahap dengar pendapat dan usulan solusi merupakan langkah demokratis dekan selaku pimpinan tertinggi fakultas untuk tidak bertindak otoriter dalam memutuskan suatu kebijakan. Beliau membuka diri melalui MKPF hingga rapat senat untuk membicarakan masalah bersama dan mencari solusinya.

Kekurangannya adalah pembahasan yang dilakukan belum sampai pada tahap penyusunan strategi yang harus dilakukan fakultas dan jenjang organisasi di bawahnya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut. Fakultas hanya menghimbau jenjang organisasi di bawahnya untuk turut menyuksekkannya. Kekurangan juga terdapat dalam hal kekuatan hukum. Hingga saat ini landasan hukum kebijakan tersebut masih pada tingkat Surat Edaran yang bersifat menghimbau. Landasan hukum yang masih berupa SE membuat isi dari SE tersebut bersifat *general*. Tidak ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk menyuksekkannya. Padahal, kejelasan mengenai implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang penting.

Menurut Edwards (1980), terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan. Salah satu faktor penting dalam komunikasi kebijakan adalah kejelasan. Kebijakan yang diimplementasikan tidak

hanya harus diterima dan dimengerti oleh para pelaksana, tetapi juga harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada para pelaksana kabur dan tidak ditetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan (Winarno, 2008).

Kekurangan-kekurangan di atas menyebabkan tidak samanya kekuatan strategi yang diterapkan jenjang organisasi di bawah fakultas untuk melaksanakan kebijakan. Setidaknya hanya PMIPA, PBS, dan PIPS yang membuat strategi lanjutan di tingkat jurusan. PMIPA memasang banner, PBS dan PIPS membuat SE Jurusan. Akibatnya belum ada keterpaduan antar jenjang organisasi dalam FKIP untuk melaksanakan kebijakan.

Hampir semua informan merespon baik terhadap kebijakan baru tersebut kecuali dua informan yang pada awalnya terkejut mengetahui mereka harus berseragam setiap Senin dan Selasa. Hal ini disebabkan karena harapan mereka sebagai pemuda yang baru saja lulus SMA untuk bisa mengekspresikan identitas melalui pakaian. Namun, meski di awal terkejut pada kebijakan tersebut, seiring berjalannya waktu akhirnya mereka dapat memahami mengapa mereka harus berseragam.

Terdapat berbagai reaksi atas kemunculan SE tersebut antara lain senang, senang namun masih merasa kurang puas karena landasan hukum yang masih berupa SE, terkejut, dan biasa. Menurut pengakuan para informan, selama ini tidak ada civitas akademika yang bereaksi menolak secara langsung pada kebijakan tersebut.

Efektivitas implementasi kebijakan dekan tentang penggunaan seragam ditinjau dari segi *process*

Kesimpulan dari deskripsi evaluasi *process*, proses implementasi belum berjalan maksimal karena belum semua dosen mendukung dan peduli terhadap tata cara berseragam mahasiswa yang baik. Terdapat informan yang mengatakan bahwa biasanya hanya dosen tua yang memedulikannya, sedangkan dosen muda lebih menekankan aspek intelektual dari pada kepribadian.

Informan lain mengatakan biasanya dosen ilmu kependidikan yang lebih peduli dibanding dosen kesastraan. Hal ini disebabkan karena dosen ilmu murni tidak mengenyam teori-teori kependidikan sehingga tidak begitu memedulikan masalah penampilan seorang calon guru. Mereka kurang menyadari kompetensi kepribadian yang harus ada pada seorang guru, sehingga hanya menyampaikan materi saja saat kuliah.

Salah seorang dosen memberikan penjelasan bahwa beliau tidak mempermasalahkan mahasiswanya yang tidak berseragam karena baginya seragam tidak bisa memperbaiki moral mahasiswa. Sikap dosen yang tidak peduli bahkan terkesan menolak tujuan kebijakan melalui seragam, sesuai dengan teori van Meter dan van Horn (1975) yang menyebutkan salah satu dari beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan kebijakan ditolak oleh pelaksana kebijakan, yakni : tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem pribadi para pelaksana,... (Winarno, 2008).

Kondisi berbeda terjadi di Kampus Kleco. Tiga informan dari Kampus Kleco menilai bahwa semua civitas akademika di sana sudah sangat mendukung dan melakukan langkah nyata atas dukungannya. Dosen dan karyawan sigap mengingatkan mahasiswa yang melanggar. Selain itu mereka juga memberi tauladan dengan memakai seragam secara tertib bahkan memakai rok panjang bagi dosen perempuan. Kondisi ini mengakibatkan semua mahasiswa Kampus Kleco berseragam dengan rapih dan tertib.

Selama ini rata-rata sarana yang digunakan setiap tahun adalah peringatan yang ditempel di Gedung F, penempelan SE di mading jurusan, prodi, BKK, tulisan di buku pedoman, dan membagikan SE pada saat Osmaru. Perkembangan pemanfaatan sarana prasarana dari tahun-tahun sebelumnya adalah penempelan banner di Gedung D dan SMS Gateway.

Hambatan yang ditemui informan selama proses implemementasi berbeda-beda. Terdapat tiga informan yang tidak menemui hambatan sama sekali, hambatan yang

berkaitan dengan dasar hukum kebijakan ditemui oleh tiga informan, hambatan yang berkaitan tentang kurangnya kepedulian dosen ditemui oleh empat informan. Hambatan-hambatan yang ada saat ini mengakibatkan masih adanya mahasiswa yang tidak tertib berseragam secara baik selama proses implementasi kebijakan.

Terdapat sumber-sumber penting dalam proses implementasi yang apabila kurang diperhatikan maka implementasi kebijakan pun cenderung tidak efektif. Menurut Edwards (1980), seseorang pelaksana mungkin mempunyai keahlian tinggi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa perlengkapan dan perbekalan yang cukup maka kemungkinan besar implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil (Winarno, 2008).

Landasan hukum yang masih pada tingkat Surat Edaran yang bersifat menghimbau sehingga isi dari SE tersebut bersifat *general*, tidak ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk menyuksekkannya dan tidak ada strategi yang disusun bersama merupakan sumber kebijakan yang kurang diperhatikan dari segi landasan hukum dan strategi pelaksanaan sehingga menghambat proses implementasi. Ketaatan dosen selama proses implemementasi merupakan sumber kedua yang menghambat. Terakhir, kurangnya pemanfaatan sarana prasana yang mengena selama proses sosialisasi merupakan sumber lain yang menghambat.

Ektivitas implementasi kebijakan dekan tentang penggunaan seragam ditinjau dari segi *product*

Data yang didapat dari informan, perubahan yang terjadi setelah mahasiswa menggunakan seragam adalah mahasiswa menjadi lebih tertib, disiplin, bangga terhadap FKIP (*sense of belonging*), lebih terkontrol dalam bertindak, merasa lebih berwibawa dan dapat ditauladani. Ini tentu dapat dikatakan bahwa tujuan penggunaan seragam sudah dapat tercapai dengan baik. Meski di luar itu

masih terdapat mahasiswa yang malu saat berseragam.

Sayangnya, tujuan yang telah tercapai dengan baik ini baru sebatas di saat mahasiswa memakai seragam. Seragam belum memengaruhi karakter keseharian mahasiswa dari segi penampilan lahiriah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang informan mahasiswa bahwa hampir semua mahasiswa di kampusnya berpakaian yang tidak mencerminkan calon guru berkarakter di luar kegiatan akademik seperti memakai celana jeans pensil, baju ketat dan pendek. Kondisi yang sama juga bisa dilihat di kampus FKIP lain. Terjadi perbedaan yang cukup signifikan pada saat mahasiswa berseragam hari Senin dan Selasa dengan cara mahasiswa berpakaian di hari selain itu. Mengutip perkataan seorang informan bahwa seharusnya karakter guru itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi di mana saja dan kapan saja. Begitu pula dengan seorang calon guru. Seharusnya karakter seorang calon guru tidak hanya ditampilkan pada saat berseragam saja, tetapi juga di saat memakai pakaian bebas, di mana saja, dan kapan saja.

SIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan metode analisis interaktif maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Evaluasi *Context*

Latar belakang dibuatnya kebijakan dekan tentang penggunaan seragam bagi calon guru di FKIP UNS adalah kondisi cara berpakaian calon guru di FKIP UNS yang tidak mencerminkan karakter calon pendidik.

Tujuan penggunaan seragam adalah untuk membentuk karakter sebagai seorang calon guru yang disiplin, taat dan tertib pada aturan, membentuk kewibawaan melalui pembiasaan saat masih menjadi calon guru (mahasiswa), mengurangi kesenjangan ekonomi, membentuk *sense of belonging* terhadap FKIP, membentuk *sense of unity*, sebagai pembeda dengan mahasiswa fakultas lain (identitas), agar terlihat rapih, dan filter

atas perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan seorang calon guru.

Evaluasi Input

Keterlibatan para pelaksana kebijakan dalam pembuatan kebijakan sampai pada tahap penyampaian kondisi cara berpakaian mahasiswa FKIP yang disampaikan dalam MKPF hingga rapat senat. Jenjang organisasi di bawah fakultas diberi kebebasan dalam menentukan strategi untuk menyelesaikan kebijakan.

Terdapat berbagai reaksi atas kemunculan SE tersebut antara lain senang, senang namun masih merasa kurang puas karena landasan hukum yang masih berupa SE, terkejut, dan biasa. Selama ini tidak ada civitas akademika yang bereaksi menolak secara langsung pada kebijakan tersebut.

Evaluasi Process

Pemanfaatan sarana prasana selama proses sosialisasi sudah cukup banyak. Namun pemanfaatan sarana prasarana yang dimanfaatkan selama ini kurang mengena pada mahasiswa dan hampir tidak ada perkembangan berarti. Selama ini rata-rata sarana yang digunakan setiap tahun adalah peringatan yang ditempel di Gedung F, penempelan SE di masing jurusan, prodi, BKK, tulisan di buku pedoman, dan membagikan SE pada saat Osmaru. Perkembangan pemanfaatan sarana prasarana dari tahun-tahun sebelumnya adalah penempelan banner di Gedung D dan SMS Gateway.

Hambatan yang terjadi selama proses implementasi adalah masih belum kuatnya dasar hukum kebijakan, kurangnya kepedulian dosen, dan kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menyosialisasikan kebijakan. Hambatan-hambatan yang ada saat ini mengakibatkan masih adanya mahasiswa yang tidak tertib berseragam secara baik selama proses implementasi kebijakan.

Evaluasi Product

Tujuan penggunaan seragam sudah dapat tercapai dengan cukup efektif.

Perubahan yang terjadi setelah mahasiswa menggunakan seragam adalah mahasiswa menjadi lebih tertib, disiplin, bangga terhadap FKIP UNS (*sense of belonging*), lebih terkontrol dalam bertindak, merasa lebih berwibawa dan dapat ditauladani. Meski di luar itu masih terdapat mahasiswa yang malu saat berseragam dan kurang memperhatikan segi kepatutan dalam berseragam.

Implikasi

Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dalam penelitian ini menggunakan perspektif efektivitas program, evaluasi program dan teori evaluasi model CIPP. Teori mengenai efektivitas program dikemukakan oleh Suryokusumo secara sederhana efektivitas dapat diartikan "tepat sasaran", yang juga lebih diarahkan pada aspek kebijakan. Sedangkan kriteria efektivitas harus menggambarkan seluruh siklus input-proses-output. Teori mengenai evaluasi program dinyatakan oleh Arikunto & Jabar yang mengatakan bahwa evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Masing-masing komponen dapat dievaluasi dengan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem, sehingga pelaksanaan evaluasi berjalan secara terpadu. Evaluasi model CIPP digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan fakultas tentang penggunaan seragam dalam rangka pembentukan karakter calon guru di FKIP UNS. Melalui evaluasi, diperoleh informasi sejauh mana keberjalanan program. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar atau pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk menindaklanjutinya.

Implikasi Praktis

Hasil penelitian menunjukka bahwa:

- Keterlibatan para pelaksana kebijakan dalam membuat kebijakan berpengaruh pada kesuksesan proses implementasi. Kurangnya keterlibatan para pelaksana

kebijakan dalam perumusan masalah, pembahasan solusi, dan strategi implementasi menimbulkan semangat para pelaksana kebijakan yang kurang tinggi dan kepedulian para pelaksana belum terlihat secara maksimal.

- b. Kejelasan instruksi berpengaruh pada proses implementasi kebijakan. Kurangnya kejelasan instruksi berdampak pada kebingungan para pelaksana kebijakan dalam proses implementasinya.
- c. Kepedulian dosen berpengaruh pada ketaatan mahasiswa dalam berseragam. Kurangnya kepedulian dalam pemberian ketauladan, pemahaman tentang pentingnya berseragam secara baik, menegur mahasiswa yang tidak tertib, dan tindakan lainnya dalam rangka menyukseskan kebijakan mengakibatkan banyak mahasiswa yang tidak berseragam secara baik dan kurang memahami apa pentingnya penggunaan seragam bagi mahasiswa.
- d. Pemanfaatan sarana dan prasana yang memadai dan menarik berpengaruh pada ketaatan mahasiswa. Kurangnya hal tersebut mengakibatkan proses implementasi berjalan kurang maksimal dan mengena pada diri mahasiswa.
- e. Seragam dapat berfungsi sebagai pembentuk karakter disiplin, taat dan tertib pada peraturan sehingga terlihat rapih, pembentuk kewibawaan, *sense of belonging*, *sense of unity*, mengurangi kesenjangan ekonomi, sebagai identitas, dan filter atas perilaku-perilaku buruk. Dampak digunakannya seragam bagi calon guru di FKIP UNS adalah calon guru di FKIP UNS menjadi lebih tertib, disiplin, bangga terhadap FKIP UNS (*sense of belonging*), lebih terkontrol dalam bertindak, merasa lebih berwibawa dan dapat ditauladani.

Saran

Kebijakan penggunaan seragam dapat dilanjutkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas

- a. Rencana fakultas untuk membuat peraturan Dekan FKIP UNS dan memasukkan aturan berseragam bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan harus melibatkan para pimpinan, senat fakultas, dan perwakilan dosen perempuan dalam hal perumusan hingga penyusunan strategi implementasi, peraturan dekan harus memuat aturan mengenai penggunaan seragam mahasiswa dengan ketentuan yang lebih jelas yaitu, warna seragam (atasan putih polos dan bawahan hitam polos), bahan (non kaos dan jeans), dan mode (atasan lengan panjang, bawahan celana panjang bagi putra dan rok dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut bagi mahasiswa putri).
- b. Peraturan dekan harus memuat aturan mengenai penggunaan seragam dosen dengan ketentuan bagi fungsionaris laki-laki hari Senin dan Selasa mengenakan dasi, bagi dosen dan karyawan hari Senin atas putih bawah hitam sedangkan Selasa atas biru muda bawah gelap. Atasan lengan panjang, bawahan celana panjang bagi dosen laki-laki dan rok dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut bagi dosen perempuan.
- c. Sosialisasi dan peringatan perlu dilakukan dengan cara yang lebih menarik, misalnya penampilan slide power point mengenai aturan berseragam dengan baik dan contoh foto mahasiswa yang berseragam dengan baik pada saat Osmaru, pemasangan banner peringatan dengan ukuran, tulisan, dan warna mencolok yang dipasang di berbagai lokasi strategis di lingkup FKIP UNS, pemberian SMS Gateway kepada seluruh civitas akademika FKIP UNS bekerja sama dengan FICOS sebagai pengirimnya.
- d. Perlunya pengawasan dari para pimpinan fakultas terhadap seluruh civitas akademika FKIP mengenai

proses implementasi dan kondisi nyata di lapangan dengan cara turun langsung ke lapangan.

2. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan FKIP UNS

Perlu peningkatan kepedulian pada seluruh dosen dan tenaga kependidikan FKIP UNS terkait penggunaan seragam dengan pemberian ketauladanan, mengingatkan, memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar, dan juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengapa harus berseragam dengan baik dalam setiap kesempatan.

3. Bagi Mahasiswa

Perlunya kesadaran pada diri mahasiswa FKIP yang merupakan seorang calon guru dengan cara berseragam secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan kepedulian mahasiswa anggota UKM untuk turut menyuksekkannya dengan memberi contoh kepada teman-temannya bagaimana cara berseragam dengan baik, mengawasi prosesnya, dan menyampaikan permasalahannya dalam audiensi dekanat atau kegiatan insidental lainnya saat bertemu dengan pimpinan fakultas.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. & Jabar, C. S. A. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan; Pedoman Teoretis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bower, C. (2003). *Reading, Writing, and Character Education*. Dalam Snowman, J., Mc Cown, R., & Biehler, R. (Eds), *Psychology Applied to Teaching*. (hlm. 64). Belmont: Wadsworth.
- Budiati, A.C., Liestyasari, S.I., & Nugraha, Y.H.T. (2010). *Simbolisme Dunia Pendidikan (Studi Semiotik tentang Makna Seragam Sekolah dan Implikasinya bagi Pendidikan Berkarakter di Kota Surakarta)*. Laporan Penelitian Tidak Dipublikasikan. FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Direktorat Ketenagaan & Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan Nasional. (2010). *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun Anggaran 2010*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.
- Dillistone, F. W. (2002). *The Power Of Symbols*. Terj. A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius.
- Duh Sex Bebas Merajalela. (2012, Januari). *Campus Life*, 76.
- Hasanah, A. (2009). Pendidikan Berbasis Karakter. Diperoleh 9 April 2012, dari <http://www.bit.lipi.go.id/masyarakat-literasi/index.php/pendidikan-berbasis-karakter>
- Hidayat, I. (2012, 21 Januari). Anggota DPR Mengkhianati Rakyat. *Tribun Timur*. Diperoleh 30 April 2012, dari <http://makassar.tribunnews.com/mobile/index.php/2012/01/21/anggota-dpr-mengkhianati-rakyat>
- Hidayatullah, M.F. (2007). *Mengabdikan Kepada Almamater: Mengantar Calon Pendidik Berkarakter di Masa Depan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press & CakraBooks Surakarta.
- Hidayatullah, M.F. (2010). *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Nordholt, H.S (Ed). (2005). *Outward Appearances (Trend, Identitas, Kepentingan)*. Terj. M. Imam Aziz. Yogyakarta: Lkis.
- Padmono, Y. (2011). *Pendidikan Karakter atau Pendidikan Karakter Baik dan Kuat (Baku)!*. Diperoleh 9 Pebruari 2013 dari <http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/13/pendidikan-karakter-atau-pendidikan-karakter-baik-dan-kuat-baku-356424.html>
- Rachman, A. (2011, Mei). Seimbangkan Otak Dengan Watak. *DIKNAS*, 31.
- Rilis Indeks Korupsi TII: Indonesia di Urutan 118 dari 176 Negara. (2012).

- Diperoleh 11 Desember 2012, dari
<http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/12/07/rilis-indeks-korupsi-tii-indonesia-di-urutan-118-dari-176-negara>.
- Satriwan. (2012). *Pendidikan (Karakter) Salah Kaprah*. Diperoleh 9 Pebruari 2013 dari
<http://edukasi.kompasiana.com/2012/10/15/pendidikan-karakter-salah-kaprah-501329.html>
- Strom, T.Q., Peterson, R.L., & Miller, C. (2003). *Student Uniforms*. Diperoleh 19 Pebruari 2012, dari www.unl.edu.
- Suharno. (2010). Peran LPTK Dalam Menyiapkan Guru yang Berkepribadian. *Jurnal Akademia*, 2, 109-120.
- Surakhmad, W. (2009). *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Kompas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (2003). Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Widoyoko, S. E. P., (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.